

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 ayat (1) pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

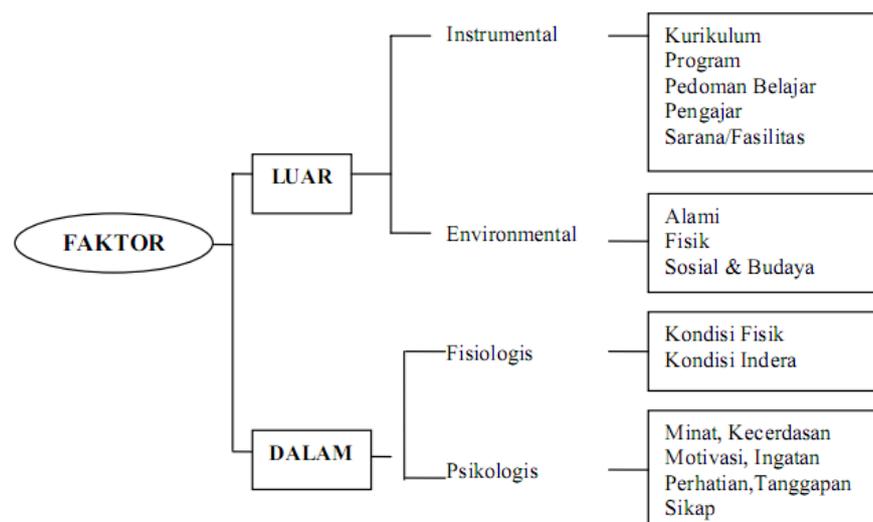
Banyak indikator yang dapat dijadikan tolok ukur bagi keunggulan dan mutu suatu sekolah. Indikator-indikator tersebut antara lain proses belajar mengajar yang ada di sekolah, kelengkapan sarana dan prasarananya, profesionalitas tenaga kependidikan atau sumber daya manusianya, prestasi akademik peserta didik, dan kualitas manajemen sekolah (Imran, 2005: 15).

Proses Belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan formal dengan guru sebagai pemeran utama. Para pakar pendidikan seringkali menegaskan bahwa guru merupakan sumber daya manusia yang sangat menentukan keberhasilan program pendidikan. Guru yang kompeten dan profesional akan lebih mampu dalam menyampaikan materi pelajaran sehingga hasil belajar siswa berada pada tingkat yang optimal.

Dari pemaparan tersebut dapat kita simpulkan bahwasannya guru merupakan faktor penting dalam proses belajar mengajar, namun bukan

berarti keberadaan unsur-unsur lain tidak begitu penting. Keberhasilan seorang guru dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama pengadaan alat-alat sekolah yang akan mendukung kelangsungan proses belajar mengajar.

Melalui proses belajar mengajar diharapkan pendidikan dapat mengubah diri anak didik baik dari aspek kognitif, efektif, maupun psikomotorik. Perubahan dari ketiga aspek tersebut akan berpengaruh terhadap tingkah laku anak didik yang terwujud pada cara berpikir, merasa, dan melakukan sesuatu yang relatif akan menetap dan membentuk kebiasaan bertingkah laku pada diri anak didik. Agar perubahan-perubahan dalam diri anak didik sebagai hasil dari suatu proses belajar mengajar sampai pada tujuan yang diharapkan, perlu diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar tersebut. Faktor-faktor tersebut dapat dilihat pada bagan berikut ini.



Gambar 1.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PBM (sumber: Muhaimin, 2005: 75)

Hamalik (2007: 30) menjelaskan, “Dengan demikian sudah jelas bahwa demi mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, maka peran dan fungsi sistem dan proses pembelajaran atau pengajaran ternyata sangat penting. Di samping dibutuhkan guru-guru yang memiliki kemampuan dan kecakapan yang lebih memadai, juga diperlukan cara-cara bekerja dan sikap yang baru, peralatan yang lebih lengkap, dan sistem administrasi yang lebih teratur”.

Alat-alat pembelajaran seperti peralatan laboratorium, yang beraneka ragam harga dan bentuknya, ada yang mahal serta langka dan ada yang murah serta mudah sekali dijumpai di pasaran, perlu mendapatkan penanganan yang serius. Akan tetapi, sayangnya alat-alat ini kurang mendapat perhatian; misalnya, ada spidol yang tintanya sudah hampir habis dan belum ada yang mau mengisikan atau membelikan tintanya, sehingga siswa sulit membaca tulisan dari guru yang ada di papan tulis. Hal sepele tersebut berpengaruh dalam proses belajar mengajar.

Melihat fenomena seperti tersebut di atas dapat ditarik benang merah bahwasanya perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah-sekolah kita saat ini masih kurang baik. Sebenarnya pengadaan alat-alat belajar itu tidak sulit, tetapi kadangkala pihak sekolah kurang memperhatikan unsur-unsur perencanaan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa mayoritas orang Indonesia biasanya kurang teliti dalam pemeliharaan alat-alat sekolah. Kelemahan dalam perencanaan dan kelemahan dalam

pemeliharaan pasti akan menjadi hambatan bagi kelangsungan proses belajar mengajar di sekolah.

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu faktor pendidikan yang keberadaannya sangat mutlak dalam proses pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana pendidikan tidak dapat dipisahkan dari faktor lainnya. Sebagaimana pendapat Mansur (dalam Arikunto, 2005: 6) menyebutkan bahwa “Kegiatan belajar mengajar di kelas memerlukan sarana atau fasilitas yang sesuai dengan kegiatan yang harus dilakukan oleh guru dan murid. Fasilitas yang tersedia turut menentukan pilihan metode mengajar”.

Proses belajar mengajar akan semakin efektif dan berkualitas apabila ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai. Proses belajar mengajar merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh guru dan siswa dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia untuk memperoleh hasil belajar yang optimal. Dengan demikian, tanpa adanya sarana dan prasarana pendidikan dapat dikatakan proses pendidikan kurang berarti. Untuk memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana pendidikan secara optimal diperlukan adanya suatu manajemen yang tepat agar tujuan pendidikan yang dirumuskan dapat tercapai secara sempurna .

Usaha pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan sebenarnya terus diupayakan melalui perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan alokasi dana pendidikan, perbaikan dan penyempurnaan kurikulum, pembinaan tenaga pengajar dan tenaga

kependidikan yang lain melalui penataran, diklat, seminar, dan workshop, serta peningkatan kesejahteraan para tenaga pengajar. Semua upaya tersebut telah dilakukan, namun tidak menghasilkan mutu yang optimal sebagaimana yang diharapkan. Menurut Sallis (dalam Usman 2006: 249), sebagian besar rendahnya mutu pendidikan disebabkan oleh buruknya manajemen dan kebijakan pendidikan. Warga sekolah hanyalah pelaksana belaka dari kebijakan yang telah ditetapkan atasannya. Pendapat Sallis tersebut mendukung pendapat Juran, salah seorang begawan mutu dunia. Juran berpendapat bahwa masalah mutu 85% ditentukan oleh manajemennya, sisanya oleh faktor lain

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah disebutkan adanya penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat, yaitu Otonomi Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang No. 25 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Undang-undang tersebut membawa konsekuensi terhadap bidang-bidang kewenangan daerah sehingga lebih otonom, termasuk di bidang pendidikan. Pengelolaan khusus di bidang pendidikan inilah yang melatarbelakangi adanya penerapan MBS pada setiap lembaga pendidikan.

Dengan adanya penerapan demokrasi pendidikan ini ke dalam kerangka manajemen berbasis sekolah, masing-masing lembaga pendidikan ditantang dengan berbagai masalah dan tuntutan seiring dengan perkembangan di segala bidang. Maka dari itu, sekolah diberikan otonomi yang lebih besar dalam kewenangannya untuk mengelola dengan menerapkan

keputusan partisipatif dalam meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan kebijakan pendidikan nasional.

Tujuan MBS adalah meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Adapun peningkatan efisiensi tersebut dapat dicapai dari keleluasan mengelola sumber daya yang ada, partisipasi masyarakat, dan penyederhanaan birokrasi. Peningkatan mutu dapat dicapai dari adanya partisipasi orang tua, kelenturan pengelolaan sekolah, peningkatan profesionalisme guru, adanya hadiah dan hukuman sebagai kontrol, serta hal lain yang dapat menumbuhkembangkan keadaan yang kondusif. Sedangkan pemerataan pendidikan tampak dari adanya partisipasi masyarakat yang mampu dan peduli, sementara yang kurang mampu menjadi tanggung jawab pemerintah (Mulyasa, 2007: 3).

Terkait dengan keterangan di atas, maka banyaklah sekolah yang mulai menerapkan MBS yang tiada lain adalah usaha untuk meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan dari sekolah itu sendiri, termasuk pengelolaan sarana dan prasarana sekolah agar siswa dapat menikmati apa yang dibutuhkan mereka saat berada di jenjang pendidikan. Dengan penerapan MBS tersebut diharapkan sekolah mampu mengupayakan mutu pendidikan serta hasil dari implementasi ini dapat terwujud dengan baik.

Peningkatan jumlah, jenis, serta kualitas sarana dan prasarana pendidikan, baik pendidikan jalur sekolah maupun luar sekolah, harus ditunjang oleh perangkat pelayanan manajemen sarana dan prasarana yang tertib agar dapat mencapai tiga aspek kegunaan, yaitu hasil, ketepatan, dan

daya guna. Jika sarana dan prasarana pendidikan dapat memenuhi tiga aspek kegunaan tersebut, diharapkan kualitas pendidikan dapat terwujud sesuai dengan harapan (Djamas, 2005: 181).

Peningkatan sarana dan prasarana mutlak diperlukan seiring dengan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan sosial budaya berpeluang mendorong kebutuhan masyarakat baik lokal maupun nasional, lebih-lebih masyarakat global. Tantangan bagi generasi bangsa di masa depan untuk menyiapkan generasi tangguh dan siap mewarnai kancah globalisasi melalui pendidikan merupakan salah satu faktornya, sehingga dengan demikian diharapkan siswa siap menghadapi kemajuan yang terus berkembang pesat.

Dengan adanya manajemen sarana dan prasarana pendidikan akan mampu mendayagunakan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Menurut Imron (2005: 85), “Tujuan manajemen sarana dan prasarana secara umum adalah untuk memberikan layanan secara profesional di bidang sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka terselenggarakannya pendidikan secara efektif dan efisien”.

SMA Institusi Indonesia yang berada di daerah Semarang ini termasuk salah satu sekolah yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah dalam memberikan kebijakan dan pemenuhan perlengkapan sekolahnya (sarana dan prasarana). Hal ini terlihat dari keterlibatan dan partisipasi wali murid, stakeholder, dan komponen sekolah yang terkait lainnya dalam memutuskan kebijakan sekolah. Sekolah ini sedang merencanakan beberapa

program dalam rangka pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana menuju sekolah bertaraf nasional, mulai dari proses pengadaan sarana dan prasarana, pembenahan sarana dan prasarana yang dimiliki, serta perbaikan manajemen sarana dan prasarana di SMA Institusi Indonesia lebih ditingkatkan lagi sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan.

Dalam hal fasilitas SMA Institut Indonesia merupakan lembaga yang memiliki sarana dan prasarana yang cukup lengkap, di antaranya gedung sekolah yang nyaman, letak yang strategis, mushola yang memenuhi standar, perpustakaan yang lengkap, serta pembelajaran berbasis IT yang sekarang mulai *ngetrend* di masyarakat kota. Minat siswa yang ingin bersekolah di sekolah tersebut cukup tinggi. Prestasi yang membanggakan juga selalu diukir oleh siswa SMA Institusi Indonesia. Prestasi yang diraih tersebut tidak lepas dari faktor tersedianya sarana dan prasarana yang lengkap. Sarana dan prasarananya selalu siap pakai untuk proses belajar mengajar maupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah. Dengan adanya sarana dan prasarana yang lengkap, sekolah ini dapat mengikuti perkembangan zaman.

Berdasarkan realitas di atas, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana manajemen sarana dan prasarana pendidikan yang dilakukan oleh SMA Institusi Indonesia Semarang. Maka dari itu, peneliti mengambil judul “MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DI SMA INSTITUT INDONESIA SEMARANG” .

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas fokus penelitian ini adalah “Bagaimana manajemen sarana dan prasarana pendidikan di SMA Institusi Indonesia Semarang?”. Fokus tersebut dibagi menjadi tiga subfokus sebagai berikut.

1. Bagaimana perencanaan sarana dan prasarana pendidikan di SMA Institut Indonesia Semarang?
2. Bagaimana pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di SMA Institut Indonesia Semarang?
3. Bagaimana evaluasi sarana dan prasarana pendidikan di SMA Institut Indonesia Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Tiga tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. untuk mendeskripsikan perencanaan sarana dan prasarana pendidikan di SMA Institut Indonesia Semarang.
2. untuk mendeskripsikan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di SMA Institut Indonesia Semarang.
3. untuk mendeskripsikan evaluasi sarana dan prasarana pendidikan di SMA Institut Indonesia Semarang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pendidikan, terutama dalam mengelola sarana dan prasarana pendidikan, sehingga mampu meningkatkan kualitas pendidikan di satuan pendidikan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Sekolah

Penulisan tesis ini setidaknya dapat dijadikan panduan atau pedoman keilmuan dan pengetahuan tentang manajemen sarana dan prasarana dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

b. Bagi Kepala Sekolah

Penulisan tesis ini diharapkan mampu memberikan masukan dan pertimbangan serta dasar untuk memperbaiki kekurangan dan kesalahan dalam manajemen sarana dan prasarana.

c. Bagi Guru

Dapat digunakan sebagai input dalam meningkatkan peran serta dalam manajemen sarana dan prasarana untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

d. Bagi Peneliti

Memberikan tambahan khazanah pemikiran baru berkaitan dengan manajemen sarana dan prasarana pada lembaga pendidikan untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita pendidikan.